

Pelestarian Struktur Sosial Desa
sebagai Upaya Mengantisipasi Budaya Urban di Indonesia
Abad ke-21¹

Oleh
Dr. Ny. Chalida Fachruddin²

Abstrak

Sepanjang sejarah perkotaan di Indonesia kota-kota tumbuh dan berkembang secara alami. Fenomena tersebut berlangsung terus sehingga menurut perhitungan statistik pada tahun 2020, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Selama ini, bertambahnya penduduk kota selalu disebut dengan urbanisasi yaitu penduduk desa pindah ke kota. Untuk dapat hidup mereka beradaptasi dengan kehidupan kota yang populer dengan budaya urban.

Namun dengan pemekaran kota yang menjadikan desa-desa menjadi wilayah perkotaan termasuk penduduknya, sehingga penduduk desa menjadi penduduk kota. Dikehendaki atau tidak oleh penduduknya harus mengikuti struktur sosial kota. Kenyataannya penduduk desa atau komunitas lokal di kawasan seperti itu akan tergusur karena mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan “budaya urban”. Seharusnya fenomena ini tidak perlu terjadi karena dalam proses menuju Indonesia baru, eksistensi dan hak berbudaya setiap komunitas perlu dipertahankan. Apalagi dalam konteks globalisasi dewasa ini, keterbukaan arus informasi dan komunikasi dapat memperkaya kebudayaan komunitas lokal. Untuk itu desa/kampung perkotaan yang terbentuk di kota-kota Indonesia tidak perlu dirubah struktur sosialnya dengan melestarikan struktur sosial desa untuk mengantisipasi “budaya urban” yang tidak cocok/sesuai dengan kebudayaan dari komunitas-komunitas lokal di Indonesia.

¹ Makalah pada Simposium dan Lokakarya Internasional II; Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru 18-21 Juli 2001. Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Padang- Sumatera Barat.

² Staff Pengajar Jurusan Antropologi FISIP-USU Medan.

I. Pendahuluan

Urbanisasi merupakan fenomena yang terus mencuat ke permukaan menerusi perubahan sosial yang melanda negara-negara di dunia. Bagi negara-negara sedang berkembang khususnya Indonesia pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu pendorong terjadinya proses urbanisasi. Akhirnya urbanisasi menjadi menjadi masalah besar dan dominan dibidang sosial, ekonomi, budaya dan pemukiman (Susanto 1979, Rahardjo 1989).

Tidak dipungkiri bahwa sudah menjadi semacam hukum bahwa masyarakat manusia berkembang terus mengikuti suatu arah. Dalam hal ini kota adalah suatu bentuk perkembangan masyarakat manusia (Rahardjo 1983).

Dari segi teori dan sejarah kota bermula dari sebuah pemukiman atau kawasan tempat tinggal yang disebut kampung atau desa. Daerah perkampungan itu berkembang menjadi kota yang merupakan pusat perkembangan suatu aktivitas masyarakat. Charles H. Cooley mengemukakan bahwa kota-kota tumbuh di daerah-daerah tempat perhentian atau penggantian transportasi seperti pelabuhan, terminal, stasiun kereta api dll (Rahardjo 1983). Pada dasarnya perkembangan suatu daerah menjadi kota terutama disebabkan kemajuan pesat dalam bidang pertanian dan teknologi hasil revolusi industri. Dengan kata lain bahwa terbentuk dan berkembangnya kota merupakan perkembangan peradaban manusia. Kota dipandang sebagai agen modernisasi dan perubahan. Kota juga sebagai pemusatan modal,

keahlian, daya kreasi dan segala fasilitasnya yang mutlak diperoleh bagi pembangunan (Marbun 1990).

Di Indonesia perkembangan kota amat pesat, terutama setelah tahun 1950 yaitu setelah perang kemerdekaan usai. Perkembangan atau pengkotaan tersebut membawa akibat positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat manusia. Segi positifnya adalah peningkatan kesejahteraan, kehidupan yang lebih praktis, cepat, ekonomis dan menyenangkan. Namun dari sisi lain berakibat negatif yang pada gilirannya menimbulkan berbagai masalah yaitu pemukiman, diorganisasi sosial, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain.

Tentang kota-kota di Indonesia menurut Kuntjaraningrat (1982) pada masa sebelum kedatangan Bangsa Barat dikenal tiga tipe kota yaitu kota istana, kota pusat keagamaan dan kota-kota pelabuhan. Kota istana dicirikan oleh susunan spatialnya yang mencerminkan konsepsi rakyat tentang alam semesta. Raja dan istananya dipandang sebagai pusat alam semesta dan penjaga keseimbangan. Kota pusat keagamaan, susunan spatialnya berkisar di sekitar makam raja-raja, bangunan suci berupa candi, stupa dan lain-lain. Kedua tipe ini pada umumnya terdapat di pulau Jawa dan Bali. Sedangkan tipe ketiga kota pelabuhan terdapat di pesisir yang perairannya merupakan lalulintas perdagangan antara Cina dan India. Dalam kota-kota pelabuhan terdapat tempat bermukimnya para pedagang asing, yang terpisah dan kampung tersebut namanya menurut negeri asalnya. Maka dikenal nama Kampung Arab, Kampung Cina, Kampung Parsi, Kampung Keling dan sebagainya.

Setelah kedatangan bangsa Barat khususnya Belanda muncul kota-kota bentuk baru berupa kota-kota administrasi pemerintah kolonial. Kota-kota tersebut terencana untuk kepentingan kolonial. Pusat kota selain diperuntukkan untuk gedung pemerintah juga kediaman kepala pemerintahan, pegawai lainnya, yang terdiri dari orang Belanda (Menno 1991). Sampai sekarang areal ini merupakan kawasan yang terbaik di semua kota di Indonesia yang pernah menjadi pusat aktivitas pemerintah kolonial Belanda.

Dalam makalah ini penulis mengutarakan upaya mengantisipasi budaya urban di Indonesia abad ke-21 memfokuskan kepada kota Medan, yang semula hanya sebuah kampung kecil menjadi kota setelah Belanda membuka perkebunan di Sumatera Timur. Kampung Medan yang sudah ada pada masa kedatangan John Anderson ke Sumatera Timur 1823 (Sinar 1995) merupakan tempat yang strategis untuk kepentingan aktivitas pemerintah dan dagang Belanda. Kesultanan Deli pada masa itu berpusat di Labuhan akhirnya juga pindah ke Medan. Sejalan dengan berubahnya Sumatera Timur menjadi kawasan yang kaya sehingga populer dengan Tanah Deli negeri Dollar, proses pengkotaan kampung Medan berlangsung sampai sekarang. Medan sedang dan dipersiapkan sebagai kota metropolitan di Indonesia bahagian Barat. Medan akan menjadi pusat pendidikan, pusat perhubungan, pusat industri dan pusat perdagangan. Bahkan sebagai pusat kegiatan dalam kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMTGT).

II. Budaya Urban

Urbanisasi dalam arti pengkotaan bukan hanya menekankan fisik saja tetapi meliputi sosial dan cultural (Rahardjo1983). Menurut Abdul Aziz (1989) proses ini berlaku sebagai akibat kemajuan teknologi dalam bidang pertanian dan perindustrian yang mencetuskan Revolusi Industri. Tetapi juga akibat perubahan masyarakat yang dicetuskan Revolusi Industri. Dengan kata lain pengkotaan terjadi karena perubahan ekonomi dari pertanian ke arah perindustrian dan perdagangan. Daerah perkotaan dipandang sebagai pusat kemajuan dan pembangunan. Pengkotaan juga merupakan proses perubahan sosial dalam masyarakat yang meliputi kehidupan individu dan masyarakat. Perubahan yang paling mendasar yaitu hilangnya ciri-ciri kehidupan desa antara lain, kesetiakawanan yang kuat baik vertikal maupun horizontal, kesadaran yang tinggi terhadap adat yang menimbulkan kemampuan menjalankan social control dalam masyarakat (Soemardjan 1993).

Dengan perubahan ekonomi tersebut diharapkan membawa implikasi kemakmuran, kemajuan dan dinamika yang berbeda dengan kehidupan di desa yang miskin, keterbelakangan, tradisional dan statis. Susunan masyarakat juga berubah dari corak yang tidak formal kepada yaitu mementingkan upah (Abdul Aziz 1989). Karenanya oleh Robert Redfield menyatakan bahwa komunitas kota lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat material dan rasional sehingga hubungan-hubungan menjadi impersonal dan sekunder. Saling mengenal hanya dalam aspek tertentu saja yang berdasarkan perhatian dan kepentingan. Hubungan sosial bersifat

kompetitif, sehingga individu mendapat tempat yang utama dalam kegiatan untuk memperoleh status. Dalam hal ini inti budaya urban ialah individualis dan materialis.

III. Kampung Perkotaan

Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa kota-kota di Indonesia termasuk kota Medan berawal dari sebuah perkampungan yang tumbuh dan berkembang secara alami. Walaupun kampung atau desa amat dipertentangkan dengan kota istilah kampung tidak hilang. Memang kampung mencirikan kawasan yang terbelakang dalam wilayah perkotaan. Namun tidak ada satu pun kota di Indonesia tanpa wilayah perkampungan. Perkampungan biasanya dihuni oleh mereka yang berpenghasilan rendah, miskin dan masyarakat kelas bawah (Djnen 1983, Murray 1994).

Keberadaan kampung perkotaan ini melalui dua proses: 1) Berpindahnya penduduk desa ke kota. Pada umumnya mereka berasal dari desa miskin, berpendidikan rendah atau putus sekolah (Salim 1984). Mereka bekerja di sektor informal sebagai pedagang kaki lima, tukang loak, pedagang eceran barang kelontong, pedagang rokok, pedagang makanan dan minuman (Suparlan 1983). Ketiadaan modal dan rendahnya pendapatan menyebabkan mereka hanya mampu bermukim pada kawasan yang tidak teratur dan kurang sehat dan sempit. Kawasan ini dikenal dengan pemukiman kumuh atau pemukiman liar dan perkampungan miskin.

Di kota Medan perkampungan ini hampir terdapat di semua kecamatan terutama di sepanjang sungai Babura dan sungai Deli. Walaupun demikian hubungan

sosial antar warga cukup akrab. Kepemimpinan non formal amat berperan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial dan adat istiadat dari masing-masing etnis. Sementara itu kepemimpinan formal dikenal masyarakat hanya untuk urusan yang bersifat administrasi pemerintah. Kondisi sedemikian berlangsung hingga tahun 80-an. Berdasarkan penelitian IDKD (1982) kota Medan pada waktu masih dalam nuansa kampung dimana norma agama dan adat istiadat mewarnai kehidupan masyarakatnya. Setelah Tahun 90-an dan terutama menjelang awal abad ke-21 ini suasana mulai berubah sejalan dengan pembangunan kota yang dijejali oleh pusat-pusat perbelanjaan dan arus informasi melalui media elektronik seperti TV dan VCD.

2) Pemekaran kota merupakan proses pengkotaan bagi desa-desa di sekitar kota-kota di Indonesia yaitu meluaskan kota dengan memasukkan kawasan semula berada di luar kota. Pemekaran ini selalu diikuti dengan penggusuran pemukiman beserta penduduknya. Untuk kota Medan fenomena ini sudah lama berlangsung karena sejak terbentuknya hingga kini terus saja memekarkan diri. Perluasan dan pengembangan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnik, termasuk pemukiman orang Melayu makin tergusur ke pinggir kota (Pelly 1996). Daerah pinggiran kota pada mulanya kawasan pedesaan yang sebahagian besar penduduknya adalah Orang Melayu yang hidup sebagai petani dan nelayan (Rusmini 1995). Kampung perkotaan masih eksis tetapi penghuni atau penduduknya telah berganti dengan etnis lain. Bentuk pemukiman yang padat dan rapat, kesemrawutan menyebabkan kawasan yang dimekarkan itu masih dikatakan kampung. Tetapi gaya hidup, hubungan sosial mencirikan kehidupan kota atau populer dengan “budaya

urban” sudah mencorakkan kehidupan masyarakatnya: seperti antar warga kurang atau tidak saling mengenal, masing-masing orang hanya mengurus keluarga sendiri saja, karena hubungan antar manusia sudah renggang dan heterogen (Koesoemahatmadja 1986, Marbun 1990). Ketidakpedulian antar anggota masyarakat dalam kampung perkotaan terlihat dari beberapa kasus penangkapan pengedar dan pemakai narkoba di rumah-rumah kampung perkotaan. Masyarakat sekitarnya hanya mengetahui dari surat kabar, televisi atau radio. Kumpul kebo dalam pemukiman dimana terdapat rumah-rumah kost mahasiswa tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat di kampung perkotaan tersebut yang diketahui orang-orang yang masih menjunjung tinggi ajaran agama dan adat. Pemilik rumah sebagai induk semang tidak merasa perlu mengetahui aktivitas atau pun perilaku penyewa atau anak kostnya. Interaksi mereka hanya mengenai uang sewa atau uang kost semata. Begitu juga kepala lingkungan sebagai pemimpin formal merasa melanggar etiket bila mencampuri kegiatan atau perihal yang berlaku dalam rumah di kewasannya kecuali ada keributan. Bagi para Kepling atau Lurah, pemilik rumah atau warga setempat mematuhi peraturan yaitu melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam. Begitu juga untuk pertemuan yang melibatkan banyak orang harus ada izin dari Kepling atau Lurah. Keamanan tamu dijamin dengan memberikan uang keamanan kepada Kepling yang akan mengerahkan orang-orangnya.

IV. Pelestarian Struktur Sosial Desa sebagai upaya mengantisipasi budaya urban di Indonesia abad ke-21

Kota-kota besar di Indonesia sangat cepat berkembang. Dalam perkembangan kota itu terjadi perubahan-perubahan infra struktur fisik dan ekonomi. Semuanya lebih menggerakkan urbanisasi dan mobilitas penduduk. Perubahan fisik kota ini diikuti atau disertai perubahan tatanan sosial dan budaya. Perubahan itu tidak hanya berlaku di pusat kota, tetapi di daerah-daerah pinggiran kota, bahkan di daerah perbatasan dan disekitar kota (Rusmini 1995).

Merupakan kecenderungan pula bahwa dalam pengembangan kota yang didorong oleh pembangunan dengan pemekaran kota. Akibatnya pedesaan yang menjadi wilayah perkotaan masuk ke dalam struktur kota. Dengan demikian wilayah tersebut tidak luput dari menerima implikasi perubahan dari perkembangan kota baik fisik maupun budaya. Dari segi fisik pengkotaan yang direncanakan amat mengagumkan dan serba gemerlap. Namun bagi komunitas lokal pengkotaan adalah bencana. Contohnya orang Melayu yang merupakan komunitas lokal secara perlahan tergusur. Kenyataannya pemekaran kota Medan berlaku sejak tumbuh hingga saat ini telah mengeluarkan orang Melayu dari dalam kota Medan. Tersingkir atau menyingkirnya mereka karena sebagai penduduk desa yang umumnya hidup dalam sistem ekonomi dan budaya pertanian dan nelayan. Tetapi yang paling tragis karena tidak dapat bersaing dengan orang-orang dari etnis lain yang mendominasi pekerjaan yang diperlukan di perkotaan. Selain itu orang Melayu sukar menyesuaikan diri

dengan perubahan lingkungan, struktur kota dan budaya urban. Apalagi selama ini pengembangan fisik kota dilaksanakan secara drastis dan dipaksakan dengan mengabaikan hak hidup mereka yang hidup di pedesaan yang biasanya merupakan komunitas lokal.

Seperti diketahui bangsa dan negara Indonesia tumbuh dari komunitas-komunitas lokal atau lebih konkrit disebut etnis³ yang juga eksistensinya perlu dihargai dan dipertahankan. Ketidakpedulian dan terabaikannya budaya dan komunitas lokal ini pada akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi masyarakat untuk menuntut keadilan dalam berbagai wujud yang menggoncangkan integritas bangsa. Karena itu perlu diperhatikan pernyataan Kartodirdjo (1994) bahwa betapa pun canggihnya teknologi, tingginya produktivitas, namun masyarakat perlu melestarikan nilai-nilai yang memperkuat hubungan sosial yang humanitarian penuh empati (tenggang rasa).

Proses urbanisasi dan pengkotaan terus berlangsung, sehingga menurut perhitungan statistik, pada tahun 2020 70% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dalam dua dekade itu masalah yang timbul akibat urbanisasi makin kompleks dan diperkirakan makin berkembangnya ” budaya urban ”. Pada umumnya permasalahan itu menjurus kepada masalah kriminalitas, yang akan terus marak dalam era globalisasi yang dapat merusak dan membuat kerdil atau lenyapnya budaya

³ Etnisitas sebagai realitas sosial perlu diberi fungsi untuk memperkaya kebudayaan nasional serta dicegah agar tidak menghambat atau menghalang-halangi integrasi nasional (Kartodirdjo 1993 : Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Keselarasan dan kebudayaan Nasional, Yogyakarta : Aditya Medan).

komunitas lokal. Hak hidup komunitas lokal hanya bisa langgeng dan berarti apabila hak mereka atas wilayah/kawasan diakui dan dipertahankan.

Dalam proses menuju Indonesia baru yang dilandasi dengan demokrasi itu komunitas lokal dapat menjadi basis, karena antar warga komunitas dilingkupi perasaan kebersamaan/solidaritas (Firth 1960). Semua sudah teratur oleh wujudnya struktur sosial yang menjalinkan unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaedah-kaedah, lembaga-lembaga sosial dan lapisan-lapisan sosial (Taneko 1984). Menjelang abad ke-21, masalah partisipasi rakyat dalam pembangunan menjadi masalah strategis yang perlu diselami secara serius oleh pimpinan negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Konsep partisipasi sebagai strategi pembangunan terkandung pengertian bahwa rakyat subjek pembangunan bukan objek pembangunan (Sutrisno 1995).

Komunitas lokal dan kebudayaannya itu seharusnya dilestarikan dan dibiarkan berkembang agar kebhinnekaan yang menjadi ciri khas Indonesia tidak tenggelam dalam arus globalisasi. Pelestarian ini bukan untuk menjadikan komunitas lokal artefak tetapi untuk mengantisipasi “budaya urban” yang berintikan individualis dan materialis.

Dari penelitian yang pernah dilakukan penulis dalam sebuah komunitas nelayan Melayu, bahwa dengan struktur sosial yang bercirikan desa komunitas tersebut dapat bertahan hidup walaupun pemukiman di paluh-paluh. Komunitas nelayan Melayu ini berada dalam Kelurahan Labuhan Deli 20 km dari pusat kota Medan. Kawasan ini menjadi wilayah Kota Medan ketika pemekaran kota tahun 1974. Dengan demikian strukturnya sama dengan kelurahan lain dalam kota yaitu

berkuasanya pemimpin formal seorang Lurah yang pegawai negeri. Sebagai wilayah perkotaan secara fisik Labuhan Deli disentuh pembangunan tahun 1980 melalui proyek MUDP (Medan Urban Development Project). Tetapi baru pada tahun 1992 Labuhan Deli tampak sebagai bahagian dari kota Medan dengan diperlebar dan diaspal satu-satunya jalan yang melintasi Labuhan Deli, sehingga transportasi dapat langsung dari pusat kota Medan ke Labuhan Deli. Proyek ini juga membangun benteng sungai Deli yang melewati Labuhan Deli, untuk kepentingan kota Medan. Ketika terjadi kekisruhan dalam masalah ganti rugi kepada penduduk termasuk para nelayan yang terkena proyek MUDP, hanya dapat terselesaikan oleh campur tangan pemimpin informal dalam komunitas nelayan Melayu tersebut.

Institusi formal yang ada di kelurahan seperti LKMD, Darma Wanita, PKK, Karang Taruna hanya papan nama di kantor kelurahan. Institusi bentukan pemerintah perannya digantikan oleh kelompok Perwiridan lelaki, Perwiridan perempuan dan Perwiridan remaja putera dan puteri. Perwiridan adalah lembaga yang terdapat dalam struktur sosial desa orang Melayu di Sumatera Utara. Masih bertahannya struktur sosial desa dalam kehidupan masyarakat Melayu di Labuhan Deli yang mayoritas nelayan itu, membuat Labuhan Deli tidak sama dengan kampung perkotaan lainnya. Struktur sosial kampung perkotaan lainnya adalah struktur sosial kota yang menjadikannya lahan yang subur bagi berkembangnya budaya urban. Dari segi lahiriah kampung kota tersebut teratur rapi apalagi kompleks-komplek perumahan. Tetapi apa yang terjadi dibalik itu sukar diketahui seperti berlangsungnya kumpul kebo, pelacuran atau aktifitas yang berhubungan dengan narkoba.

Labuhan Deli sebuah kampung perkotaan dari penampilan tidak dapat dibanggakan terutama pemukiman para nelayan. Tetapi identitas kampung ini sebagai pemukiman yang religius dan bermoral tidak diragukan. Sampai awal abad ke-21 ini belum pernah terdengar keterlibatan penduduk dengan narkoba, pelacuran apalagi kumpul kebo. Padahal lokasi kelurahan ini hanya 6 km dari pelabuhan Belawan dan berdekatan dengan Sicanang yang merupakan daerah pelacuran hanya dipisahkan oleh sebuah paluh. Di tepi kelurahan ini ada warung-warung tuak, tetapi kawasan komunitas Melayu ini bersih dari orang-orang yang membuat keributan karena mabuk.

Kerukunan dan keharmonisan antar warga kampung yang menjadi ciri masyarakat pedesaan masih mewarnai kehidupan masyarakatnya. Satu hal yang menarik dari masyarakat nelayan Melayu di Labuhan Deli ini walaupun hidup keseharian dalam kemiskinan, selalu mementingkan keutuhan keluarga. Jarang terjadi perceraian apalagi yang disebabkan masalah ekonomi, sebagaimana sering terjadi pada masyarakat miskin seperti yang pernah berlaku di Indramayu dengan persentase perceraian yang tinggi (Rasyidi 1986). Selain para isteri belum materialistis, dalam perkampungan ini hubungan sosial masyarakatnya mementingkan gotong royong dan semangat kejiwaan, amat menghargai dan mendengar pemimpin informal yang terdiri dari pemuka masyarakat dan pemuka agama.

IV. Penutup

Hidup bermasyarakat sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dalam masyarakat itu manusia dapat saling berinteraksi melalui berbagai aktifitas. Menurut Firth (1960) bahwa struktur sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok dan terjalin dalam lembaga-lembaga, didalam mana banyak orang ambil bagian. Sejak terbentuknya kelompok sosial, seorang atau lebih memegang peranan aktif dan dipatuhi oleh anggota kelompoknya. Orang tersebut diangkat menjadi pemimpin kelompok. Dalam struktur sosial desa, kelompok dan lembaga sosial terbentuk secara alamiah berdasarkan hubungan darah (kekerabatan), adat dan kepercayaan atau agama. Kaedah yang mengatur interaksi sosial masyarakat bersangkutan menjadi pengetahuan turun-temurun (mentradisi) dan tidak tertulis tetapi dipahami oleh semua anggota masyarakat.

Struktur sosial desa itu menurut penulis perlu dilestarikan dalam upaya mengantisipasi “budaya urban”. Dalam hal ini bukan berarti hendak mempertahankan agar komunitas lokal tetap tradisional dan menjadi eksklusif. Yang penting dalam struktur sosial desa tidak dikenal pemaksaan karena interaksi antar anggota masyarakat berdasarkan gotong royong, musyawarah dan kesetaraan. Pemimpin diangkat karena wibawa. Wibawa dimiliki bukan karena kekuasaan tetapi kemampuan dan keteladanan seseorang/sekelompok orang yang diakui sebagai pemimpin oleh masyarakatnya. Disamping itu lembaga yang terdapat di pedesaan wujud karena kepentingan masyarakat untuk berinteraksi. Sebagaimana halnya dalam

komunitas nelayan di labuhan Deli tersebut lembaga yang wujud sesuai dengan adat dan agama yang mendasari kehidupan orang Melayu yaitu perwiridan. Kelompok perwiridan terdiri dari masing-masing kelompok perempuan, lelaki serta pemuda dan pemudi. Kelompok ini mempunyai nama-nama berbaur agama Islam seperti Al Munawarah, Silaturrahmi, Al Huda, Al Hidayah dan sebagainya. Aktifitas kelompok-kelompok perwiridan ini melaksanakan wirid yasin pada hari yang ditentukan. Selain itu melakukan berbagai kegiatan sosial seperti membantu anggota ketika menghadapi musibah dan dalam pelaksanaan upacara-upacara “life cycle”. Melalui perwiridan para anggota memperoleh informasi dan sebagai alat komunikasi antar anggota dan pemerintah.

Kelompok-kelompok perwiridan dipimpin oleh orang yang dipilih karena kefasihan membaca Alqur’an, do’a dan pengetahuan agama. Bersama Nazir mesjid dan ustadz-ustadz mereka menjadi pemimpin informal dalam komuniti nelayan Melayu di Labuhan Deli membina masyarakat religius dan bermoral walaupun hidup dalam kemiskinan. Masyarakat seperti ini diharapkan sebagai sarana atau wadah dalam mengantisipasi budaya urban yang individualistis dan materialistis yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Rahimah 1989 : Pengantar Sosiologi Pembangunan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Bintarto, Prof., Drs. 1983 : Interaksi Desa – Kota, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Djenen, Drs., M.Sc., 1982 : Perkampungan di kota sebagai Wujud Adaptasi Sosial (Kehidupan di perkampungan Miskin di Kodya Medan), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Firth, Raymond, 1960 : Ciri-ciri dan Alam Hidup Manusia, Bandung: Penerbit Sumur.
- Kartodirdjo, Prof. Dr. Sartono, 1993 : Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Keselarasan dan Kebudayaan Nasional, Yogyakarta : Aditya Media.
- Koentjaraningrat 1982 : Masalah-masalah Pembangunan : Bunga Rampai Antropologi Terapan, Jakarta: LP3ES.

Marbun, B.N, SH. 1990 : Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Menno, S. dan Mustamin Alwi, 1991 : Antropologi Perkotaan, Jakarta: Rajawali Pers.

Murray, Alison Y., 1994 : Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta, Sebuah Kajian Antropologi Sosial, Jakarta: LP3ES.

Pelly, Usman 1996 : Kedinamikaan dan Perubahan Sosial di kalangan Orang Melayu dalam Mereka yang Terpinggir, Mohammed Salleh Lamry (Penyunting) Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM.

Rahardjo, Drs., M.Sc., 1983 : Perkembangan Kota dan Permasalahannya, Jakarta: Bina Aksara.

Rasyidi, Lili, 1986 : Masalah Perceraian di Indonesia : Suatu Kajian kes. di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Indonesia, Thesis Ph.D, Universiti Kebangsaan.

Rusmini, Nani, 1996 : Dampak Perkembangan Kota Terhadap Ekonomi Petani Melayu di Pinggiran Kota Medan dalam Mereka yang Terpinggir,

Mohammed Salleh Lamry (Penyunting) Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM.

Salim, Prof., Dr. Emil 1984 : Perkampungan kota dalam Sejumlah Masalah Pemukiman Kota, Ir. Eko Budihardjo (Penyunting). Bandung : Penerbit Alumni.

Sinar, Tengku Luckman 1991 : Sejarah Medan Tempo Doeloe, Medan: tpt.

Soemardjan, Selo 1993 : Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan, (Penyunting) Desiree Zuraida dan Yufrina Rizal, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soetrisno, Loekman 1995 : Menuju Masyarakat Partisipatif, Jogjakarta; Penerbit Kanisius.

Suparlan, Dr. Parsudi 1982 : Gelandangan sebuah konsekwensi perkembangan kota, Makalah pada seminar Pola dan Strategi Terpadu tentang Alternatif Penanggulangan Masalah Gelandangan: UII, Fakultas Hukum, Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Kaliurang 1-4 Maret 1982.

Susanto, Dr. Phil Astrid 1979 : Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Taneko, Soleman, b. SH, 1984 : Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar
Sosiologi Pembangunan, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.